

ABSTRAK

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam ruang lingkup desa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga tersebut mempunyai visi yang sama yaitu memajukan desa, akan tetapi kedua Lembaga tersebut berlandaskan hukum yang berbeda. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian tata kelola ekonomi desa. hal ini akan berdampak pada konflik regulasi internal yang menghambat efektivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari dualisme tersebut serta merumuskan model koordinasi yang harmonis antara kedua lembaga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah sinkronisasi aturan antara kebijakan nasional dan daerah. Hasil penelitian menyarankan pembagian peran yang spesifik: Bumdes difokuskan pada pengelolaan aset strategis dan layanan publik (fungsi sosial-ekonomi), sementara Koperasi diarahkan pada unit usaha spesifik berbasis anggota. Harmonisasi ini memerlukan peran pemerintah desa sebagai regulator untuk menciptakan sinergi hukum yang mencegah pertentangan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Kata Kunci: Dualisme Kelembagaan, Bumdes, Koperasi Desa, Implikasi Hukum, Tata Kelola Ekonomi Desa.

ABSTRACT

The presence of the Merah Putih Village Cooperative and the Village-Owned Enterprise (Bumdes) within the village jurisdiction has the potential to cause overlapping authority. Both institutions share the same vision of advancing the village, but they are based on different laws. Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives and Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This difference creates uncertainty in village economic governance. This will have an impact on internal regulatory conflicts that hinder the effectiveness of the local economy. This study aims to analyze the legal implications of this dualism and formulate a harmonious coordination model between the two institutions.

This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach to examine the synchronization of rules between national and regional policies. The results of the study suggest a specific division of roles: Bumdes focuses on the management of strategic assets and public services (socio-economic functions), while cooperatives are directed at specific member-based business units. This harmonization requires the role of the village government as a regulator to create legal synergy that prevents conflicts and provides a clear dispute resolution mechanism.

Keywords: *Institutional Dualism, Bumdes, Village Cooperatives, Legal Implications, Village Economic Governance.*